

Pengembangan Konsep *Smart Government* (Pemerintahan Cerdas) di Kelurahan Sindangsari Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang

Baby Novega Aprilianti ^{1*}, Yusmedi Yusuf ², Agus Suherman ³

^{1*,2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Syekh Yusuf, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia.

Abstrak. Penelitian ini membahas pengembangan konsep *Smart Government*. Dapat diketahui bahwa *Smart Government* adalah pengembangan dari konsep pemerintahan cerdas untuk memberikan solusi bagi masalah di wilayah pedesaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengembangan konsep *smart government* di Kelurahan Sindangsari serta apa saja hambatan yang dihadapi dalam pengembangannya, beserta upaya untuk mengatasinya. Hasil penelitian ini dapat diukur dengan menggunakan tiga indikator *smart government* menurut Cohen (2014) dalam Santoso & Rahmadanita (2020), yaitu: *Online Service*, *Infrastructure*, dan *Open Government*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *smart government* di Kelurahan Sindangsari pada indikator *Online Service* sudah menunjukkan hasil yang baik, sedangkan pada indikator *Infrastructure* dan *Open Government* menunjukkan hasil yang belum optimal akibat keterbatasan sumber daya anggaran dan sumber daya manusia, yang memengaruhi kapasitas Kelurahan Sindangsari dalam menyediakan sarana berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pada kedua indikator tersebut.

Kata kunci: Pengembangan; *Smart Government*; Teknologi Informasi dan Komunikasi; Website.

Abstract. This research discusses the development of the *Smart Government* concept. It can be observed that *Smart Government* represents the advancement of governance concepts to provide solutions to problems in rural areas. This research uses descriptive qualitative methods. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques in this study are: data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The purpose of this research is to examine the development of the *smart government* concept in Sindangsari Village, identify the obstacles encountered in its development, and explore efforts to overcome them. The results of this study are evaluated using three key indicators of *smart government* as outlined by Cohen (2014) in Santoso & Rahmadanita (2020): *Online Service*, *Infrastructure*, and *Open Government*. The findings show that the *smart government* concept in Sindangsari Village has produced favorable results for the *Online Service* indicator, while the *Infrastructure* and *Open Government* indicators are less optimal due to limited budget resources and human capital, which hinders the village's capacity to provide information and communication technology-based services. Therefore, improvements in both indicators are necessary.

Keywords: Development; *Smart Government*; Information and Communication Technology; Website.

* Corresponding Author. Email: babynovegaa@gmail.com ^{1*}.

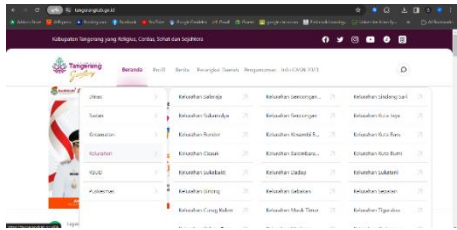
Pendahuluan

Konsep *smart city* digunakan untuk mengatasi berbagai hambatan dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan publik (Gunartin, 2018). Menurut Cohen (2014), *Smart Government* merupakan salah satu aspek penting dari konsep *smart city*. *Smart government* merupakan salah satu manifestasi dari enam dimensi utama dalam menilai *smart city* menurut Cohen (2014), yaitu: *smart environment*, *smart mobility*, *smart government*, *smart economy*, *smart people*, dan *smart living* (Santoso & Rahmadanita, 2020). *Smart Government* dikembangkan sebagai solusi untuk masalah di wilayah pedesaan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi masyarakat setempat. Selain itu, *smart government* bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat lokal akan pentingnya era digital dan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi institusi pemerintahan.

Dalam implementasinya, *smart government* membutuhkan pemanfaatan media berbasis elektronik, seperti penggunaan dan pengembangan situs web pemerintah. Dengan adanya media elektronik ini, kelompok kepentingan atau pemangku kepentingan dapat mengakses informasi dengan lebih cepat, yang pada akhirnya mempercepat pelayanan publik (Sari, 2023). Kelurahan Sindangsari, yang terletak di Kecamatan Pasarkemis, Kabupaten Tangerang, memiliki luas wilayah sebesar 430 hektar dengan jumlah penduduk mencapai 30.170 jiwa. Secara administratif, wilayah ini terdiri dari 10 RW dan 112 RT. Kelurahan Sindangsari merupakan kawasan persawahan yang perlahan berubah menjadi area pemukiman serta kawasan industri berskala menengah dan besar. Perubahan ini mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

Pemerintah Kecamatan Pasarkemis telah menyediakan sebuah situs web, yaitu SIOMAN (Sistem Informasi Organisasi Manajemen Kecamatan), yang berfungsi untuk memberikan pelayanan administrasi dan informasi kependudukan secara daring. Situs web SIOMAN terhubung dengan situs web terpadu milik Kabupaten Tangerang serta beberapa situs web Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Kelurahan dan Desa di wilayah tersebut, termasuk situs web OPD Kelurahan Sindangsari.



Gambar 1. Laman Website Terpadu Kabupaten Tangerang

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintahan setempat, situs web OPD Kelurahan Sindangsari diharapkan menjadi landasan untuk memberikan kemudahan akses informasi terkait desa kepada warga setempat. Namun, dalam penerapan *smart government* di Kelurahan Sindangsari, terdapat tiga indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan konsep ini, yaitu: *Online Service*, *Infrastructure*, dan *Open Government* (Cohen, 2014 dalam Santoso & Rahmadanita, 2020).

Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek. Pertama, pelayanan publik di Kelurahan masih dominan dilakukan secara manual, di mana masyarakat merasa lebih nyaman datang langsung ke kantor Kelurahan untuk mengurus berbagai layanan kependudukan. Kedua, prosedur daring yang telah tersedia masih belum dipahami dengan baik oleh sebagian masyarakat. Ketiga, kapasitas sumber daya pemerintah Kelurahan masih terbatas akibat kendala anggaran dan rendahnya kesadaran masyarakat, yang berdampak pada rendahnya partisipasi dalam memanfaatkan teknologi informasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengetahui bagaimana pengembangan *smart government* di Kelurahan Sindangsari, serta hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses pengembangannya dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

Metodologi Penelitian

Adapun objek pada penelitian ini berfokus pada pengembangan konsep *smart government* yang dilaksanakan di Kelurahan Sindangsari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian

kualitatif dengan paradigma penelitian *postpositivisme*. Jenis dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif-deskriptif yang diperoleh dari data primer dan data sekunder.

Dalam metode pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi non-partisipan dikarenakan peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat saja, lalu data yang didapatkan berupa perilaku yang tampak, terucapkan, dan data tertulis yang diperoleh dengan meninjau *website* Kelurahan Sindangsari serta aplikasi berbasis *website* Kecamatan Pasarkemis, dan melakukan kunjungan ke Kantor Kelurahan Sindangsari. Selanjutnya peneliti melakukan kegiatan wawancara terstruktur, dan dokumentasi sehingga teknik analisis data pada penelitian ini yaitu; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara untuk memastikan keabsahan data. Hasil analisis dari pengumpulan data akan diuraikan pada bab ini yang didukung oleh kajian penelitian terdahulu tentang konsep *smart government* dengan tujuan memenuhi untuk memahami pengembangan konsep *smart government* di Kelurahan Sindangsari serta mengidentifikasi hambatan dan upaya dalam mengatasi tantangan pada pengembangan konsep *smart government* di Kelurahan Sindangsari. Untuk mengetahui keberhasilan dari pengembangan konsep *smart government* dapat diukur dari ketiga indikator menurut Cohen (2014) dalam (Santoso & Rahmadanita 2020) diantaranya; *Online service*, *infrastructure*, dan *Open government*. Ketiga indikator tersebut dijabarkan dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, sebagai berikut:

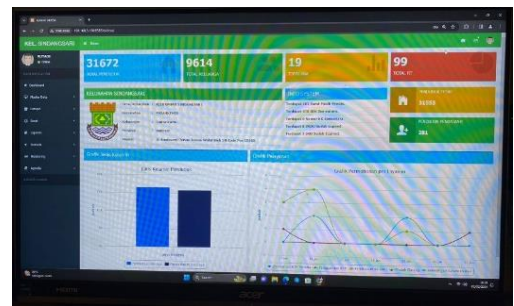
Online Service (Pelayanan Online)

Menurut Cohen (2014) dalam (Santoso & Rahmadanita, 2020) mengukur layanan *online* dapat dilakukan dengan melihat bagaimana

layanan pemerintahan yang dapat diakses oleh warga melalui *website* atau *smartphone*. Dilihat dari upaya dari pemerintah setempat di lingkup Kelurahan dalam memberikan layanan administrasi dan informasi yang berbasis teknologi.



Gambar 2. Laman *Website* OPD Kelurahan Sindangsari



Gambar 3. Aplikasi SIDESA Kelurahan Sindangsari

Tujuan dari penyediaan *website* tersebut adalah agar warga dapat mencari informasi terkait berbagai layanan dan aktivitas Kelurahan melalui *platform online* tersebut. Ini menunjukkan upaya Kelurahan dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan kemudahan akses informasi bagi warga. Untuk pendataan kependudukan, Kelurahan menggunakan aplikasi sistem sendiri yang dinamakan SIDESA.

Kelurahan Sindangsari menyediakan layanan *online* melalui forum RT/RW yang menggunakan aplikasi *WhatsApp*. Melalui forum ini, warga dapat menyampaikan pertanyaan atau permintaan layanan kepada ketua RT/RW masing-masing, yang kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada pihak Kelurahan. Ini merupakan bentuk adaptasi penggunaan teknologi yang lebih sederhana dan familiar bagi masyarakat untuk meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik.

Infrastruktur

Menurut Cohen (2014) dalam (Santoso & Rahmadanita, 2020), dalam mengukur indikator infrastruktur dilihat dengan memperhatikan komponen yang terpasang seperti *wi-fi*, *broadband*, dan *sensor* serta menilai integrasi layanan dalam satu sistem terpadu, terutama untuk layanan kesehatan dan keselamatan masyarakat setempat. Pemerintah Kelurahan Sindangsari sebagai instansi yang memberikan layanan infrastruktur agar dapat mendukung pengembangan *smart government*. Jaringan Wi-Fi yang cukup baik memungkinkan Kelurahan untuk menjalankan operasional pelayanan kependudukan dengan lancar, termasuk dalam proses penginputan dan pengaksesan data yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efisien. Berikut pernyataan dari pihak Kelurahan Sindangsari: “Infrastruktur jaringan wi-fi ini tujuannya buat memfasilitasi akses internet bagi warga yang datang ke Kantor Kelurahan Sindangsari serta dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam berbagai layanan pemerintahan yang melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk luas jaringan internet disini hanya sekitar radius limapuluh meter.” Meskipun luas jaringan ini terbatas, keberadaannya memungkinkan warga untuk menggunakan layanan *online* dan mengakses informasi pemerintah dengan lebih mudah dan efisien di area sekitar Kantor Kelurahan Sindangsari.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa penggabungan layanan-layanan publik dalam satu *platform* terpadu di Kelurahan Sindangsari belum terlaksana secara menyeluruh. Saat ini, Kelurahan hanya menyediakan *website* OPD untuk menginformasikan kegiatan yang dilaksanakan, dan belum mengintegrasikan semua layanan publik dalam satu *platform online* yang terpadu. Meskipun demikian, pihak Kelurahan menyadari pentingnya integrasi layanan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Meski terbatas dalam pengembangan teknologi sendiri, Kelurahan berupaya memberikan layanan seperti pengurusan surat-menyerat kepada masyarakat secara menyeluruh dengan menyediakan jaringan internet di Kantor Kelurahan Sindnagsari.

Open Government (Pemerintahn yang terbuka)

Indikator *open government* bertujuan untuk meningkatkan kedekatan antara pemerintah dan masyarakat. Menurut Cohen (2014) dalam (Santoso & Rahmadanita, 2020) untuk mengukur indikator *open government* melalui dimensi keterbukaan informasi publik, partisipasi publik, dan keberadaan kebijakan untuk keamanan data penduduk. Di Kelurahan Sindangsari, dukungan untuk menerapkan pemerintahan yang terbuka terus ditingkatkan dengan mengoptimalkan keterbukaan dalam pelayanan publik. Kelurahan aktif mengundang masukan dari masyarakat melalui forum musyawarah untuk memastikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat terwakili dengan baik, mencerminkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini dapat dikemukakan berdasarkan hasil wawancara bahwa Kelurahan Sindangsari mendukung konsep pemerintahan terbuka dengan menyediakan informasi publik melalui *website* OPD dan media sosial. Mereka mematuhi kebijakan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan menyalurkan informasi baik secara *offline* maupun *online*.

Transparansi secara penuh tidak selalu dapat diberikan karena keterbatasan legalitas dalam menyampaikan data kependudukan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pasal 84 tentang Administrasi Kependudukan. Pihak Kelurahan juga belum memiliki akses ke aplikasi SIAK untuk mengamankan data kependudukan, yang hanya diakses oleh kecamatan. Meskipun mendukung keterbukaan, Kelurahan merasakan bahwa konsep pemerintahan yang terlalu terbuka bisa menjadi masalah, terutama karena pelayanan di Kelurahan bersifat non-retribusi dan harus melapor ke kecamatan untuk setiap program atau kegiatan yang dijalankan. Untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam konsep pemerintahan yang terbuka di Kelurahan Sindangsari, belum ada program yang spesifik dari Kelurahan sendiri. Adapun upaya dari pihak kecamatan yang lebih memiliki wewenang untuk mengimplementasikan program-program

terkait, seperti gerebek posyandu dan pelayanan gratis. Kelurahan sendiri berfokus pada program-program yang sesuai dengan lingkungannya, seperti pengembangan lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang lebih asri dan tertata.

Pembahasan

Pengembangan Konsep *Smart Government* di Kelurahan Sindangsari

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengembangan konsep *smart government* serta mengidentifikasi hambatan dan upaya mengatasinya. Keberhasilan pengembangan konsep ini bergantung pada tiga indikator utama menurut Cohen (2014) dalam Santoso & Rahmadanita (2020), yaitu: *Online Service* (pelayanan *online*), infrastruktur, dan *Open Government* (pemerintahan terbuka). Berikut penjelasan hasil penelitian berdasarkan ketiga indikator tersebut: Pada indikator *Online Service*, teknologi komunikasi di Kelurahan Sindangsari sangat penting dalam memperkuat interaksi antara penyedia dan penerima layanan. Pelayanan publik menjadi bagian vital dalam tata kelola pemerintahan, dan pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Upaya pemerintah setempat dalam meningkatkan kualitas layanan publik menggunakan teknologi informasi dan komunikasi telah memperlancar proses pelayanan publik, serta memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan tersebut (MADE, 2023). Penggunaan teknologi tidak hanya mempercepat akses informasi tetapi juga meningkatkan efisiensi layanan, yang berdampak pada peningkatan mutu pelayanan publik (Eno Novita Maharania & Dewi Sekar Kencono, 2021).

Pengembangan layanan online di Kelurahan Sindangsari telah menunjukkan indikator positif dalam penerapan konsep *smart government*. Penyediaan website OPD dan aplikasi SIDESA merupakan langkah awal yang baik. Penggunaan teknologi sederhana seperti WhatsApp untuk forum RT/RW juga menunjukkan bentuk adaptasi yang baik, meskipun masih diperlukan peningkatan infrastruktur teknologi agar layanan online dapat diakses dengan lebih luas dan mudah. Pada indikator infrastruktur, teknologi

informasi dan komunikasi memainkan peran krusial dalam mendukung operasional modern di berbagai sektor seperti bisnis, pendidikan, pemerintahan, dan layanan kesehatan (Purba *et al.*, 2018). Infrastruktur teknologi ini sangat diperlukan untuk mendukung berbagai kegiatan operasional pemerintah Kelurahan Sindangsari, terutama dalam memberikan pelayanan publik yang optimal. Namun, penelitian menunjukkan bahwa penerapan infrastruktur teknologi informasi di Kelurahan Sindangsari belum optimal. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan dana, kurangnya integrasi layanan, serta cakupan infrastruktur yang masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan investasi lebih lanjut dalam pengembangan infrastruktur dan platform terpadu, peningkatan kapasitas, serta kerjasama yang lebih erat dengan pemerintah pusat dan sektor swasta. Kelurahan Sindangsari berharap layanan SRIKANDI dari pemerintah pusat dapat terealisasi untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis teknologi.

Indikator *Open Government* berkaitan dengan transparansi pelayanan publik, yakni penyediaan informasi terkait pemerintahan yang dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat setempat. Keterbukaan dalam prosedur administrasi kependudukan, misalnya, bertujuan memperlancar proses pelayanan publik (Agustine & Prawira, 2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Kelurahan Sindangsari telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip *open government*, implementasinya belum optimal. Masih terdapat kendala terkait regulasi dan legalitas data, serta akses ke sistem teknologi yang lebih canggih. Untuk mencapai tingkat optimal, diperlukan peningkatan infrastruktur teknologi, kolaborasi dengan pihak ketiga, serta program spesifik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa indikator *Online Service* sudah berjalan dengan baik, terutama melalui penggunaan website OPD dan aplikasi SIDESA. Namun, pada indikator infrastruktur dan *Open Government*, hasilnya masih belum optimal karena adanya keterbatasan dana. Oleh sebab itu, diperlukan investasi lebih lanjut dalam pengembangan kapasitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi agar layanan berbasis teknologi dapat berjalan secara menyeluruh.

Hambatan dan Upaya Mengatasinya dalam Pengembangan Konsep *Smart Government* di Kelurahan Sindangsari

Beberapa hambatan yang dihadapi dalam pengembangan konsep *smart government* di Kelurahan Sindangsari antara lain:

- 1) Pegawai Kelurahan menyadari pentingnya integrasi layanan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Namun, keterbatasan dana dan kebutuhan untuk bekerjasama dengan pihak ketiga menjadi kendala utama. Kelurahan berharap inovasi menuju *smart government* dapat terwujud melalui layanan SRIKANDI dari pemerintah pusat.
- 2) Sebagian warga setempat mengakui pentingnya infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung pelayanan pemerintahan, tetapi masih banyak yang lebih memilih datang langsung ke kantor Kelurahan untuk urusan administratif. Kerjasama dengan sektor swasta atau pihak ketiga diperlukan untuk meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dan pelayanan pemerintahan.
- 3) Kelurahan Sindangsari terus berupaya meningkatkan keterbukaan dalam pelayanan publik. Masyarakat sering diundang untuk berpartisipasi dalam musyawarah guna memastikan aspirasi mereka terwakili. Namun, transparansi dalam memberikan informasi masih dibatasi oleh regulasi yang mengatur privasi data kependudukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Akses aplikasi SIAK hanya diberikan kepada Kecamatan, bukan Kelurahan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap temuan penelitian, kesimpulan mengenai Pengembangan Konsep *Smart Government* di Kelurahan Sindangsari dapat dirumuskan sebagai berikut: Mengacu pada tiga indikator utama yang dikemukakan oleh Cohen (2014) sebagaimana dikutip oleh Santoso & Rahmadanita (2020), penelitian menunjukkan bahwa indikator *online service* (pelayanan *online*) sudah berjalan dengan baik. Namun, indikator

infrastruktur dan *open government* (pemerintahan terbuka) belum mencapai tingkat optimal. Hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan dari sisi sumber daya, baik dalam hal kapasitas teknologi informasi maupun keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas yang disediakan. Beberapa hambatan yang ditemukan termasuk rendahnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Kelurahan Sindangsari. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran juga mempengaruhi kapasitas kelurahan dalam menyediakan layanan berbasis teknologi informasi yang memadai. Akibatnya, masyarakat hanya bisa mengakses informasi yang terbatas, dan layanan *online* belum sepenuhnya direalisasikan. Upaya untuk mengatasi hambatan ini terlihat dari komitmen pihak Kelurahan Sindangsari yang terus berinovasi menuju penerapan *smart government* dengan menggandeng pihak ketiga atau sektor swasta untuk meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dalam pelayanan publik.

Saran yang dapat diberikan adalah agar pemerintah lebih meningkatkan kapasitas dan menyediakan sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan demikian, pelayanan dan akses terhadap keterbukaan informasi dapat lebih optimal. Partisipasi masyarakat juga perlu ditingkatkan agar konsep *smart government* yang diterapkan oleh pemerintah dapat berjalan dengan lebih efektif. Selain itu, masyarakat juga harus lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi agar layanan informasi publik berbasis teknologi dapat berfungsi secara maksimal.

Daftar Pustaka

- Agustine, T. E., & Prawira, M. Y. (2018). Analisis Kebijakan Pemerintahan Terbuka dalam Pelayanan Publik di Kota Denpasar. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 20(2), 71-88.
- Bahirah, H. I. (2022). Smart Village Sebagai Jawaban Desa Masa Depan. *Translitera*:

- Jurnal Kajian Komunikasi dan Studi Media*, 11(2), 23-35. DOI: <https://doi.org/10.35457/translitera.v11i2.2344>.
- Guenduez, A. A., Singler, S., Tomczak, T., Schedler, K., & Oberli, M. (2018). Smart government success factors. *Yearbook of Swiss Administrative Sciences*, 9(1).
- Gunawan, I. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*. Bumi Aksara.
- Hermayanti, E. S., & Yuwono, T. (2020). Implementasi green smart village di dalam upaya meningkatkan pembangunan desa (Desa Banyuanyar Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali). *Journal of Politic and Government Studies*, 9(02), 121-130.
- Kuantitatif, P. P. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. *Alfabeta, Bandung*.
- Kurniawan, B. (2022). Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Penerapan Smart Village Di Provinsi Lampung Tahun 2021.
- MADE, Y. R. (2023). IMPLEMENTASI PROGRAM SMART VILLAGE DI KAMPUNG TANJUNG REJO KECAMATAN NEGERI AGUNG KABUPATEN WAY KANAN.
- Maharani, E. N., & Kencono, D. S. (2021). Penerapan Smart Governance Dalam Smart Village Di Kalurahan Dlingo, Kabupaten Bantul. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 5(2), 25-38. DOI: <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v5i2.14472>.
- Mellouli, S., Luna-Reyes, L. F., & Zhang, J. (2014). Smart government, citizen participation and open data. *Inf. Polity*, 19(1-2), 1-4.
- Moleong, L. J. (2007). Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi.
- NANDA, S. L. (2023). Implementasi Program Smart Village Di Provinsi Lampung (Studi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung).
- Nugroho, S. (2013). Democracy and Governance in Village and City Council. *JURNAL CITA HUKUM-INDONESIAN LAW JOURNAL*, 1(2), 247-262.
- Pasolong, H. (2020). Metode penelitian administrasi publik.
- Purba, H. S., Sukmawati, R. A., Adini, M. H., & Sari, D. P. (2018). Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada lingkungan pemerintahan desa di kecamatan Sungai Pandan.
- Santoso, E. B., & Rahmadanita, A. (2020). Smart City Di Kota Bandung: Suatu Tinjauan Aspek Teknologi, Manusia, Dan Kelembagaan. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, 2(2), 16-40. DOI: <https://doi.org/10.33701/jtkp.v2i2.2315>.
- Sari, D. N. F. (2023). Implementation of E-Government In Citizen Services And Resident Registration In Banyuasin Province (Research on Application Population Management Information System). *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(6).
- SARI, N. (2021). Implementasi Konsep Smart Goverment Dalam Pelayanan Media Center Di Kota Surabaya. *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, 1(1), 145-165. DOI: <https://doi.org/10.38156/jisp.v1i1.9>.
- Subekti, T., & Damayanti, R. (2019). Penerapan model smart village dalam pengembangan desa wisata: Studi pada desa wisata boon pring sanankerto turen kabupaten malang. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 3(1), 18-28.